

Kendala Multikulturalisme di Indonesia; Analisis Diakronis dan Sinkronis

IMAM SETYOBUDI¹ DAN MUKHLAS ALKAF²

¹Jurusan Seni Tari, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Indonesia

²Jurusan Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Surakarta, Indonesia

Email : mukhlasalkaf@gmail.com

Multikulturalisme sudah banyak dibicarakan, diseminarkan, dan dijadikan *workshop*. Akan tetapi, Indonesia yang mewarisi multikultural, ternyata belum memiliki kesadaran multikulturalisme secara penuh. Terbukti hingga kini masih saja timbul konflik dan ketegangan yang terjadi di antara etnis, agama, dan ras yang ada. Artikel ini memaparkan sejumlah kendala kenapa bangsa Indonesia belum punya kesadaran multikulturalisme. Dua pendekatan (diakronis dan sinkronis) digabungkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum adanya kesadaran multikulturalisme. Ditemukan lima masalah utama penyebab yang menjadi hambatan belum adanya kesadaran multikulturalisme yang diajukan pula pemecahannya.

The Multiculturalism Obstacles in Indonesia; the Analysis of Diachronic and Synchronic

This study aims to revitalize the role of performing arts in the midst of their people and empower actors performing arts theater Cirebon. For this research it intends to get a model, both studies as well as in contemporary packaging that can empower local performing arts community needs in his day. The method used in this research using phenomenological approaches and qualitative paradigms. To get the model studies and packaging theatricals, data search focus is directed on material performance, elements of the show, and the structure of the show, and the values and performances are still to be understood today's society. After going through a series of studies will be conducted packaging theatricals, especially against the compaction duration, the addition and reduction of material performance, the actualization of the elements of the show with no change in the structure and values that exist and are still subjected to by society. The results of this study is a model study and packaging theatricals Cirebon. Model studies and packaging generated theatrical Cirebon expected to inspire the folk performing arts theater in Indonesia, for the performing arts community continues to live and support his supporters.

Keywords: Model, performing art, empowerment, and revitalization

Asia Tenggara sudah sejak lama memperoleh pengaruh dari luar, Budhisme dan Hinduisme yang datang dari India; kemudian Islam datang dari Timur Dekat dan India dan juga China yang sudah terpengaruh Islam; tentara Mongol mempengaruhi peradaban China dari utara; dan kebudayaan Barat berasal dari orang-orang Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang

belakangan. Dari setiap lapisan baru kebudayaan asing, elemen-elemen umum diperkenalkan ke dalam seni pertunjukan. Banyak percampuran silang terjadi di antara kebudayaan tetangga di Asia Tenggara (Brandon, 2003: 3).

Kedudukan negara Indonesia yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, sudah sejak ribuan tahun

silam turut memperoleh pengaruh dari luar. Situasi dan kondisi di dalam negara juga sangat majemuk. Kemajemukan yang tampak dari keanekaragaman suku-suku bangsa (etnis) yang ada, tidak sebatas suku-suku besar seperti Minang, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Madura, Makasar, Ambon, namun juga sub-sub etnis yang terdapat pada suku Dayak dan Papua. Jadi dapat dikatakan negara Indonesia kaya ribuan etnis berikut bahasa ibu dan budayanya, termasuk keberadaan keturunan Arab, India, Pakistan, Tionghoa, Indo-Belanda, dan Indo-Portugis berikut tradisi dan budayanya. Ditambah keberadaan agama Budha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Khong Hucu berikut aliran-aliran yang terdapat di dalamnya maupun agama lokal seperti *Kaharingan*, *Sunda Wiwitan*, dan sebagainya ikut mewarnai mozaik keindonesiaan yang ada. Namun demikian, keanekaragaman yang ada apakah akan dapat menjadi sebuah kekuatan bangsa atau justru sebaliknya malah menjadi faktor kelemahan yang berpotensi sekaligus pemicu perpecahan bangsa.

Koentjaraningrat (1982: 345-346) pernah mengemukakan adanya lima masalah besar bangsa Indonesia berkenaan dengan integrasi nasional: masalah mempersatukan aneka warna suku bangsa, masalah kebudayaan nasional, masalah hubungan antar-umat beragama, masalah hubungan mayoritas-minoritas, serta masalah integrasi kebudayaan dan sub-kebudayaan yang ada di Papua. Kelima masalah tersebut masih dapat ditambah dengan dua masalah yang tak kalah penting, yakni masalah keadilan ekonomi dan politik, dan masalah hubungan antara hukum adat (*ulayat*) dan hukum positif nasional.

Bukti-bukti adanya konflik sulit ditepis, kasus antara Madura dan Dayak, kasus minoritas (Tionghoa) dan mayoritas (Jawa dan Sunda), kasus agama di Poso dan di Maluku, maupun yang belakangan muncul konflik antara Ahmadiyah dan kelompok muslim garis keras (Front Pembela Islam, Forum Umat dan Ulama Indonesia, Islam Reformis, dan kelompok Islam ideologis garis keras lainnya). Fakta bahwa Indonesia termasuk negara multikultural sangat nyata. Akan tetapi, sampai detik ini pemerintah dan rakyat seperti sulit mengatasi konflik-konflik horizontal yang sangat mungkin sekali timbul. Tampak sekali pemerintah belum memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana mencegah potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat muncul.

Kebijakan Orde Baru di dalam menangani konflik dengan cara represif ternyata tidak membawa pemecahan nyata, justru sebaliknya malah menanam potensi konflik yang baru. Salah satu contoh, Timor-Timur memisahkan diri menjadi negara baru Timor Leste, yang semula termasuk salah satu provinsi di Indonesia. Penyelesaian yang menarik ada pada kasus Aceh, paska Orde Baru runtuh, dapat diselesaikan dengan cara damai, eksistensi Gerakan Aceh Merdeka diakomodir jadi salah satu partai politik lokal dan turut di dalam pemilu lokal di Aceh. Meskipun separatisme di Nangroe Aceh Darusalam dapat diselesaikan secara damai, tetapi separatisme di Papua Barat masih merupakan momok. Persoalan separatisme di Papua Barat dengan keberadaan Organisasi Papua Merdeka, semakin diperparah dengan konflik kepentingan ekonomi, antara orang-orang setempat (kesejahteraan) dengan pemerintah dan *Freeport* (ekonomi global atau neo-kapitalisme). Pekerjaan rumah lainnya, masih terdapatnya api dalam sekam, soal konflik antar-aliran agama, konflik antar-agama, konflik ras dan etnis, ketegangan antara eksistensi hukum adat dan hukum positif nasional yang biasanya pada persoalan kepemilikan tanah dan hutan sebagai contoh suku-suku peladang dan perusahaan pemegang HPH.

Perkembangan paham multikulturalisme sangat memprihatinkan sekali. Kasus-kasus konflik yang kerap mewarnai pemberitaan media cukup membuktikan, bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia belum punya kesadaran akan hal ini. Jika dibiarkan bukan sesuatu yang tidak mungkin, Indonesia dapat mengikuti disintegrasi Uni Sovyet. Tulisan ini berupaya menelusuri kenapa kita yang mewarisi multikultural ternyata belum mempunyai kesadaran multikulturalisme? Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, kami memadukan pendekatan diakronis dan sinkronis, karena diharapkan dapat menggali akar-akar persoalan yang menjadi kendala bagi kelangsungan paham multikulturalisme.

Pendekatan diakronis lebih menekankan acuan waktu, digunakan untuk menguji pertumbuhan kesadaran nasionalisme pada elit masyarakat apakah didasari multikulturalisme atau tidak. Pendekatan sinkronis yang tidak terlalu memperhatikan acuan waktu, mempertajam analisis untuk mengurai lebih dalam apakah bangsa Indonesia mempunyai

akar multikulturalisme atau tidak. Atas dasar dua pendekatan ini diharapkan dapat dideskripsikan secara analisis adanya faktor utama kenapa kita belum punya kesadaran multikulturalisme, padahal bangsa Indonesia mampu merumuskan nilai-nilai ideal multikulturalisme berupa ideologi negara Pancasila. Terdapat kontras antara ide (gagasan) dengan implementasi.

MULTIKULTURALISME

Sejauh ini, perbincangan para ahli berbagai disiplin ilmu tentang multikulturalisme sudah banyak. Seminar dan *workshop* multikulturalisme baik pada tingkat regional dan nasional sudah diselenggarakan berbagai perguruan tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, belum ada kemajuan berarti. Setidaknya sudah membuktikan satu hal, bahwa terdapat kesenjangan antara pemikiran elit dengan khalayak ramai.

Bergulirnya gagasan mengenai multikulturalisme merupakan tanggapan atas berbagai persoalan yang timbul di dalam dinamika kebudayaan, di mana persoalan bukan semata-mata konflik antar-etnis, agama, dan ras, namun sekaligus juga kritik terhadap konsep akulturasi dan asimilasi yang ternyata bukan suatu pemecahan tepat. Akulturasi yaitu suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan lenyapnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat, 1990: 248). Sedangkan asimilasi yaitu suatu proses sosial yang timbul bila ada: a) golongan-golongan manusia dengan latar-belakang kebudayaan yang berbeda-beda; b) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama; sehingga c) kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya, dan menyesuaikannya dengan kebudayaan dari golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat-laun kehilangan kepribadian

kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas (Koentjaraningrat, 1990: 255).

Kedua proses tersebut di dalamnya justru terjadi ketidaksetaraan, multikulturalisme, ditinjau fungsinya bagi kehidupan manusia, sebaiknya menjadi ideologi yang didasari pada kesadaran empiris, bahwa kondisi obyektif-rasional di dunia terdiri atas perbedaan-perbedaan yang ada, dan perbedaan itu dirayakan bersama dalam semangat saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Prinsip dasar multikulturalisme yang menolak segala otentisitas dan esensialitas kebudayaan, adalah untuk mengukuhkan keberbedaan sebagai upaya lebih menghidupkan empati terhadap pihak lain yang berbeda. Jadi multikulturalisme bukan menciptakan perbedaan atas dasar identitas teritorial serta batas-batas budaya yang bersifat totemis, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan empati terhadap *liyan* sebagai yang sederajat serta setara dalam keberbedaannya.

Atas dasar uraian di atas, paham multikulturalisme berupaya menyelesaikan potensi ketegangan yang mungkin terjadi antar-kelompok kebudayaan (etnis, agama, dan ras) dalam koridor paradigma hubungan dialogis yang lebih mengedepankan empati terhadap pihak lain yang berbeda sekalipun minoritas. Oleh karena itu, perspektif yang didasari multikulturalisme lebih mengembangkan cara pandang bukan menurut kebudayaan sendiri, akan tetapi melihat seturut cara pandang pihak lain, sehingga muncul kesadaran eksistensi pihak lain dalam ruang kebersamaan yang sederajat dan setara. Multikulturalisme termasuk paham inklusif (terbuka).

Paradigma hubungan dialogis dalam multikulturalisme bergerak baik dalam ruang publik maupun privat (Harahap, 2008). Dalam ruang publik, seluruh kelompok etnis, agama, dan ras yang berbeda-beda memperoleh kesempatan sama dan hak sama guna mengekspresikan dirinya dalam suatu tatanan yang disepakati bersama oleh masing-masing kelompok yang berbeda dengan tanpa meminggirkan suara atau kekuatan kelompok minoritas. Dalam ruang privat masing-masing kelompok etnis, agama, dan ras dapat mengekspresikan leluasa kebudayaannya,

mengembangkan kebanggaan sebagai satu bangsa dan satu negara menurut cara serta sudut-pandang masing-masing, serta menghargai dan menghormati hak-hak sipil lainnya, termasuk hak-hak hidup kelompok minoritas.

ANALISIS DIAKRONIS DAN SINKRONIS

Analisis Diakronis

1. Dua Pasal yang Direvisi Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 32 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang belum diamandemen berbunyi, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Pasal 32 setelah mengalami empat kali revisi menjadi terdiri atas dua ayat. Ayat satu, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya", dan ayat dua, "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Bunyi Pasal 32 yang belum diamandemen apabila dibaca selintas terkesan indah, akan tetapi jika disimakcermati bunyi tersebut justru berimplikasi menumbuhkembangkan primordialisme etnis. Apa yang dimaksud sebagaimana Pasal 32 (Penjelasan Pasal Demi Pasal): Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa (Yamin, 1959: 44). Puncak-puncak kebudayaan di daerah sebagai kebudayaan bangsa (Indonesia) menyiratkan totemisme. Kebudayaan daerah mayoritas berkuasa atas yang minoritas. Minoritas harus tunduk pada kebudayaan daerah yang mayoritas. Jadi bunyi pasal tersebut sangat monokulturalisme akibat kelemahan konsep. Pengertiannya menjadi sangat berbeda dengan Pasal 32 yang sudah direvisi empat kali menjadi terdiri atas dua ayat. Negara menjamin kebebasan masyarakat, baik yang mayoritas maupun minoritas, dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Substansi Pasal 32 amandemen mencerminkan multikulturalisme.

Semangat multikulturalisme juga tercermin pada Pasal 6 UUD 1945 (amandemen). Ayat satu berbunyi, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus

seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden". Artinya, apapun latar-belakang etnis, agama, dan rasnya, jika seseorang termasuk warga negara Indonesia sejak kelahirannya dapat mengajukan diri dan dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, asal tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani.

Secara prinsip pengertian bunyi Pasal 6 (amandemen) yang mengalami tiga kali revisi sangat berbeda dengan bunyi Pasal 6 sebelum direvisi, ayat satu, "Presiden harus orang Indonesia asli". Istilah kata 'asli' mengandung makna konotatif dengan 'pribumi' (sinonim). Dengan demikian, ada implikasi lawan kata 'asli' ('pribumi') adalah yang bukan asli (bukan pribumi) alias 'palsu'. Jelas bagi mereka yang termasuk warga keturunan (Tionghoa, Arab, India, Indo-Belanda, Indo-Portugis) tidak memperoleh hak yang sama untuk dapat mengajukan diri maupun dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 sebagaimana yang belum diamandemen mengandung diskriminasi ras, sehingga belum mencerminkan multikulturalisme.

Pertanyaan selanjutnya sekadar menguji kadar multikulturalisme bangsa Indonesia adalah apakah siap menerima (bahkan memilih) seorang Presiden atau seorang Wakil Presiden dari kalangan selain yang memeluk agama Islam (agama mayoritas di Indonesia)? Pertanyaan ini penting diajukan dikarenakan dalam UUD 1945, baik yang sebelum diamandemen maupun yang sudah diamandemen, tidak diatur seseorang harus memeluk agama tertentu. Jika jawabannya belum siap, maka kita belum menganut paham multikulturalisme.

2. Paham *Bhinneka Tunggal Ika*

Apakah semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang dicuplik dari kitab *Sutasoma* karya *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua* yang berarti, "Walaupun berbeda, namun satu juga adanya, sebab tak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda" (Kaelan, 2003: 31-32). Seturut pendapat Kaelan, bahwa realitas kehidupan agama (Hindu, Budha, dan Islam) di bawah Majapahit sudah menunjukkan adanya kerukunan dan

toleransi. Jadi meskipun dasar agama resmi yang dianut Majapahit adalah Hindu, tetap memberikan hak hidup bagi dua agama lain, Budha dan Islam.

Wilayah kekuasaan Majapahit yang membentang dari Semenanjung Melayu (Malaysia) hingga Papua (Irian Jaya) melalui Kalimantan Utara membutuhkan kerangka pemersatu agar sendi-sendi kekuasaan tidak goyah. Majapahit yang berdiri tahun 1293 mengalami masa kejayaan semasa diperintah Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Oleh karena itu, Empu Tantular menulis kitab *Sutasoma* sebagai legitimasi kekuasaan membenarkan penaklukan kerajaan lainnya. Sebagaimana sumpah Gajah Mada yang terkenal, *Palapa* pada tahun 1331, “Saya baru akan berhenti puasa makan Palapa, jika seluruh nusantara takluk di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Jika Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan”.

Berdasar uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan, bahwa ada beban sejarah yang tidak selaras dengan pemaknaan *Bhinneka Tunggal Ika* semasa sekarang yang dipahami sebagai multikulturalisme. Beban sejarah berkaitan erat dengan cara Majapahit menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di nusantara guna memperluas wilayah kekuasaan.

Perbedaan seting waktu, masa Majapahit dan masa pemerintahan Hindia-Belanda, sungguh jelas menunjukkan kesadaran multikulturalisme memang belum ada. Timbul pertanyaan selanjutnya, kapan kesadaran multikulturalisme itu mulai lahir bibit-bibit awalnya? Apakah pada waktu Kebangkitan Nasional ataukah Soempah Pemoeda?

Analisis Sinkronis

1. Periode Kesadaran Nasionalisme

Kebanyakan ahli sejarah mengaitkan kesadaran multikulturalisme dengan proses terbentuknya kesadaran nasionalisme. Dalam hal ini, Ben Anderson (2002) menjelaskan nasionalisme sebagai *imagined communities* (komunitas-komunitas terbayang), yaitu orang-orang membayangkan tentang rasa kebersamaan senasib-sepenanggungan tanpa harus pernah bertemu muka sebelumnya

atau bahkan tak pernah saling kenal. Proses terbentuknya nasionalisme modern akibat pengaruh luar yang berkembang di Eropa, ahli sejarah sepakat mengambil *entry point* pada kelahiran Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Kendati demikian, harus disadari Wahidin Soedirohusodo selaku pendirinya masih sebatas untuk kepentingan kaum priyayi Jawa – para pelajar Sekolah Kedokteran Jawa yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Mereka yang dapat masuk lembaga pendidikan tersebut otomatis mereka yang berlatar-belakang priyayi atau ningrat. Rakyat jelata tidak mungkin dapat masuk ke sekolah tersebut. Jadi kesadaran tersebut sebatas kesadaran kaum priyayi, dan bukan kesadaran rakyat kebanyakan. Kaum priyayi mulai sadar adanya kedudukan sosial yang berbeda dengan kedudukan sosial orang-orang Belanda.

Tidak berbeda halnya dengan Sarikat Dagang Islam (SDI) yang berdiri tahun 1911 atas prakarsa Haji Samanhoedi; dan SDI merupakan organisasi pengusaha batik Laweyan di Surakarta yang mengkritik kebijakan ekonomi kolonial yang merugikan. Perkembangan agak berbeda terjadi pada Sarikat Islam (1912), dan yang kemudian pecah menjadi Sarikat Islam “putih” dan Sarikat Islam “merah”. SI “putih” tidak beda jauh dengan SDI, akan tetapi SI “merah” yang memperoleh pengaruh paham komunis lebih mengarah sebagai organisasi massa yang tidak sekadar mewedahi kepentingan kaum priyayi Jawa. SI “merah” merekrut anggota dari kalangan rakyat jelata sebagai cikal-bakal Partai Komunis Indonesia (PKI).

Boedi Oetomo hingga SI sesungguhnya masih sebatas organisasi masyarakat dan belum merupakan partai politik, maka cikal-bakal partai politik baru sekitar tahun 1913 dengan Indische Partij atau Partai Hindia (Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Soewardi Soerjoeningrat atau Ki Hajar Dewantoro). Partai politik pertama di Hindia-Belanda ini cenderung berhaluan ideologi sosialis. Ki Hajar Dewantoro pernah menulis brosur berjudul *‘Als ik een Nederlander Was’* (Andaikata aku orang Belanda) yang bertepatan dengan hari peringatan kebebasan Kerajaan Belanda dari kekuasaan Kerajaan Perancis pada tahun 1813. Sebuah sindiran sinis gaya orang radikal. Akibat tulisan tersebut tiga serangkai pendirinya ditangkap dan diasingkan ke luar negeri.

Seorang Belanda pelarian politik berhaluan komunis dari negeri Belanda, Sneevliet memasuki Hindia-Belanda dan menyebarkan pengaruh komunisme kepada anggota SI (Semaun dan Darsono), sehingga SI pecah menjadi “putih” dan “merah” pada tahun 1914. Perlahan-lahan SI “merah” yang semula sebatas organisasi massa berubah menjadi partai politik bernama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920. Sekitar tahun 1926/1927, PKI melakukan pemberontakan di Madiun (Jawa Timur) terhadap pemerintah Hindia-Belanda yang berujung kegagalan, karena pemberontakan yang tidak sepenuhnya didukung semua anggotanya. Salah satu anggota PKI yang menentang Tan Malaka, belakangan mendirikan partai politik baru, Partai Republik Indonesia di Bangkok (1927), sewaktu dalam pelarian dari kejaran polisi Belanda. Dalam waktu bersamaan, Partai Nasional Indonesia (1927) berdiri atas prakarsa Soekarno, Cipto Mangunkusumo, dan Sartono. PNI memiliki haluan ideologi sosialis-nasionalis.

Selintas, kita dapat melihat, sebetulnya sudah ada kesadaran kritis para elit masyarakat pada waktu itu akibat pengaruh pemikiran Karl Marx yang berkembang pesat pada waktu itu. Karl Marx sudah menulis tiga jilid buku *Das Capital*. Jauh sebelumnya tulisan pendek Karl Marx sebagai kritik terhadap imperialisme dan kolonialisme menginspirasi terbentuknya rasa nasionalisme awal pada kesadaran para elit masyarakat waktu itu. Tampak sekali pada warna pemikiran Soekarno, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantoro, Semaun, Darsono, Douwwes Dekker, dan Sneevliet. Selama proses tersebut, yang terlihat masih sporadis, perlahan-lahan di antara tokoh-tokohnya terjalin komunikasi yang mengarahkan pada Konggres Pemuda Indonesia II yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 yang menghasilkan rumusan Soempah Pemoeda. Konggres Pemuda Indonesia II dihadiri tidak kurang 750 orang yang mewakili beragam latar-belakang suku-bangsa (Jong Java, Jong Sumatra Bond, Jong Batak Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Islamiten Bond, hingga Pemuda Kaum Betawi) mampu menghasilkan rumusan:

Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia; Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia.

Butir-butir yang termaktub di dalam Soempah Pemoeda dapat dikatakan sebagai sebuah konstruksi multikulturalisme dalam rangka membangun kesadaran nasionalisme yang berpijak pada kenyataan empiris. Hanya saja harus disimakcermati, bahwa Soempah Pemoeda tetap mencerminkan ikrar elit pemuda (sebagian besar berasal dari kalangan priyayi) beragam latar-belakang suku, agama, dan ras menyatukan diri dalam kebulatan tekad menentang kolonialisme dan imperialisme. Suatu sikap dan tindakan atas dasar pikiran baru yang membalik kekolotan yang lebih memikirkan kepentingan kenyamanan status sosial golongan priyayi mapan yang condong berpihak pada pemerintah Hindia-Belanda (Kerajaan Belanda – *status quo*). Jadi wacana pemikiran menjelang 28 Oktober 1928 mencerminkan percikan pemikiran baru golongan priyayi muda yang mulai memperoleh pengaruh pikiran paham nasionalisme. Selain adanya pengaruh teori kritis Karl Marx yang menelanjangi praktik kolonialisme dan imperialisme yang dipakai untuk memahami secara kritis situasi dan kondisi Hindia-Belanda. Salah satu buktinya, ideologi Marhaenisme yang dirumuskan Soekarno sebagai ideologi PNI yang terinspirasi langsung teori pertentangan kelas sosial Karl Marx.

Setidaknya, perlu menempuh rentang waktu 17 tahun sejak ikrar Soempah Pemoeda dapat menunjukkan hasil dengan meraih momentum Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mereka yang semula para pemuda radikal, sudah menjadi politisi senior yang mampu merumuskan serta mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menjadi *founding fathers* dari sebuah negara baru yang ingin berdaulat melepaskan diri dari cengkeraman pemerintah kolonial. Paska proklamasi kemerdekaan merupakan usaha mempertahankan *de facto* untuk meraih *de jure* atas kedaulatan negara yang baru saja berdiri (lahir), dan Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949.

2. Periode 1949 – 1965

Sejak Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Indonesia, dan menawarkan bentuk negara federal, atas dasar Konferensi Meja Bundar (KMB) dan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun demikian, bentuk

negara federal hanya sempat berlangsung setahun dikarenakan para pimpinan RIS sepakat untuk kembali bergabung menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Meskipun Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer berdasar UUD Sementara 1950. Sistem parlemen, yang melaksanakan roda pemerintahan kabinet di bawah Perdana Menteri dan bertanggung-jawab kepada parlemen, sedangkan posisi presiden sebatas simbol. Ekses yang timbul di bawah sistem parlementer, kabinet sangat bergantung pada dukungan partai-partai politik yang ada pada parlemen, sehingga kerap terjadi pergantian kabinet. Selama proses tersebut, terjadi persoalan mendasar, atas dasar hak siapa anggota parlemen sebagai wakil partai politik bersuara. Timbul keraguan. Para anggota parlemen sejauh ini belum melalui proses dipilih langsung rakyat. Dengan demikian, pada tanggal 29 September 1955, Pemilu I diadakan untuk memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk anggota konstituante yang bertugas menyusun UUD. Selama rentang waktu tiga tahun, pergantian kabinet masih terjadi, sementara itu, konstituante belum berhasil menyusun UUD yang baru. Berdasar saran Jenderal A. Nasution, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut, pembubaran konstituante, kembali berlakunya UUD 1945, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota-anggota DPRS ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan.

Presiden Soekarno mengeluarkan konsep Demokrasi Terpimpin yang sesungguhnya menyimpang dari amanat Pancasila dan UUD 1945. Ekses negatif yang timbul, posisi presiden berkedudukan sebagai eksekutif sekaligus legislatif. Presiden berkuasa tanpa batas. Ia membawahi DPRS/MPRS. Para menteri di bawah presiden, dan sekaligus pimpinan anggota MPRS. Ketua MPRS menjabat rangkap Wakil Perdana Menteri III. Hak budget DPRS tidak berjalan, karena pemerintah tidak mengajukan Rancangan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (RAPBN). Bahkan sewaktu DPRS tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah, Presiden Soekarno membubarkan DPRS, dan selanjutnya

membentuk DPRGR (Mardojo, 1978: 215 dikutip dari Soegito, 1999: 16).

Selama rentang 1959 hingga 1965, perjalanan negara baru Indonesia diwarnai pemberontakan, PRRI Permesta, Republik Maluku Serikat, Kahar Muzakar, dan DII/TII. Pergolakan politik yang terjadi di daerah-daerah yang kemudian ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebetulnya membuktikan bahwa kesadaran multikulturalisme belum ada. Kesadaran yang ada pada waktu itu, masih sebatas disatukan oleh keberadaan musuh bersama, yaitu kolonial Belanda. Praktis sewaktu musuh bersama sudah tidak ada, perpecahan atas dasar kepentingan kelompok dan golongan muncul apapun alasannya atau sekadar masalah sederhana. Salah satu contoh, pemberontakan Kahar Muzakar yang kemudian bergabung dan ikut mendukung Negara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosoewirjo lebih didasari kekecewaan akibat tidak direkrut sebagai TNI.

Jejak rekam pertumbuhan kesadaran nasionalisme tidak seiring dengan pertumbuhan kesadaran multikulturalisme. Elit politik yang terlibat dalam perjuangan memerdekakan, paska Proklamasi Kemerdekaan, perlahan-lahan terlibat dalam perseteruan tentang bentuk negara. Pertentangan tentang konsep dan bentuk negara menunjukkan adanya bukti-bukti kesadaran multikulturalisme sebagaimana tercermin di dalam konstruksi Soempah Pemoeda mulai dilupakan. Pertentangan di antara elit politik nasional merembes ke daerah-daerah, dan pergolakan politik daerah mewarnai perjalanan sejarah awal negara Indonesia.

Situasi dan kondisi politik semasa Demokrasi Terpimpin ikut terseret arus perang dingin politik dunia, pertentangan ideologi liberal (humanisme bourgeois) dan komunisme (humanisme proletariat). Soekarno mengambil kebijakan politik luar negeri poros Jakarta-Peking-Moskow, sehingga membuka peluang PKI di bawah D.N. Aidit dekat dengan kekuasaan. Soekarno dan PKI membawa politik dalam negeri terlibat pertentangan politik dunia. Ekonomi dalam negeri carut-marut akibat embargo Amerika Serikat dan sekutu.

Kebijakan otoriter Soekarno kemudian dikritik partai politik lain dengan membentuk Front Pancasila. Mereka yang tergabung dalam Front

Pancasila menganggap Soekarno dan PKI sudah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, karena memberangus partai politik maupun kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah (Partai Masyumi dan Manifes Kebudayaan). Tokoh-tokoh kritis terhadap kebijakan Soekarno, seperti Mochtar Lubis ditangkap dan dipenjarakan. Timbul eskalasi politik nasional yang memanas. Mahasiswa di luar kubu PKI mulai menuntut mundur Soekarno dan pembubaran PKI. Dalam situasi genting, Kolonel Untung (Komandan Cakrabirawa Pasukan Pengawal Presiden) berinisiatif menyelamatkan Soekarno dengan menangkap sejumlah jenderal Angkatan Darat dalam sebuah peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) pada tahun 1965. Namun demikian, aksi sesaat tersebut gagal dan justru menjadi bumerang bagi deklaratornya sendiri dan PKI berikut ormas-ormas di bawahnya yang mendukung G 30 S.

3. Periode 1966 – 1997

Seorang perwira tinggi yang menjabat Komandan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Letjen. Soeharto memperoleh keuntungan untuk tampil sebagai “penyelamat”. Aksi-aksi balasan anti-Soekarno dan PKI semakin meluas dan membesar, bahkan tanpa kendali terjadi serangkaian pembantaian massa terhadap siapa pun yang dianggap PKI. Perlahan-lahan dalam sebuah Sidang Istimewa DPRS/MPRS dengan Ketua Jenderal A. Nasution mengangkat Soeharto menjadi Presiden RI mengganti Soekarno yang sedang sakit. Lahir rezim baru bernama Orde Baru dengan sistem ekonomi pertumbuhan Rostow di bawah Profesor Widjojo Nitisastro, Profesor Soemitro, Profesor Emil Salim, dan kelompok alumni Universitas Berkley. Mereka mengajukan konsep Pembangunan Nasional 5 tahun yang terkenal dengan Pelita yang dirancang sebagai Repelita. Namun demikian, apa yang terjadi tidak beda jauh dengan rezim Soekarno dan justru jauh lebih buruk. Selama 32 tahun, rezim orde baru membudayakan korupsi dan mental asal bapak senang. Soeharto mengklaim demokrasi Pancasila, padahal sesungguhnya jauh melenceng dari nilai-nilai Pancasila. DPR/MPR berikut komponen Golongan Karya (Golkar), Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah (UD), dan dua parpol (PPP dan PDI) sekadar cap stempel kekuasaan. Praktis tidak ada beda antara Demokrasi Terpimpin dengan Demokrasi Pancasila ala Soeharto.

Selama 32 tahun, konglomerat binaan rezim Orba menggerogoti uang negara, sehingga sejumlah bank BUMN dan bank swasta nasional terlilit kredit macet. Fundamental ekonomi rapuh akibat praktik korupsi. Akibatnya ketika terjadi krisis ekonomi global (moneter) Juli 1997, negara Indonesia terhempas hingga titik bawah. Pertumbuhan ekonomi Rostow yang dibangun arsitek sama sekali tidak menciptakan rembesan ekonomi ke masyarakat kelas bawah. Kesenjangan ekonomi sangat tajam dan luar biasa. Dalam sistem kebijakan penggajian juga dapat dikatakan 1:500 yang berarti tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Gaji seorang Gubernur dan Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan guru honorer dan PNS yang ada di daerah terpencil seperti jarak langit dan bumi.

Setahun sebelum Indonesia kena imbas krisis moneter Juli 1997, Soeharto melalui menantunya (Letjen. Prabowo) dan Jenderal Wiranto mulai mendekati pada kelompok Islam garis keras yang pernah direpresinya. Wiranto memprakarsai pembentukan Pam Swakarsa yang menghadang peningkatan frekuensi demonstrasi mahasiswa di Jakarta dalam jumlah besar. Pam Swakarsa yang membawa simbol-simbol Islam merupakan cikal-bakal Front Pembela Islam. Mereka meneriakkan anti Amerika Serikat dan Yahudi, serta memfitnah demonstrasi mahasiswa yang mengkritik Orba ditunggangi CIA dan zionis untuk menghancurkan Islam. Spanduk-spanduk dukungan kepada Soeharto dipampang sepanjang jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin atas nama Pam Swakarsa dan umat Islam.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin melorot hingga Rp16.000,- per 1 dolar AS semakin memicu tuntutan menuntut mundur Soeharto. Amien Rais selaku tokoh utama reformis menyiarkan peringatan Kebangkitan Nasional di Lapangan Monas pada 20 Mei 1998. Akan tetapi, Letjen. Prabowo selaku Komandan Kopassus mengancam akan menembak massa mahasiswa yang berani mendekati ke Monas. Tentara sudah sejak dua minggu memasang barikade pagar kawat berduri sekitar 1 kilometer dari Istana Negara. Pengamanan ring satu dalam keadaan siaga satu. Tiga hari sebelum hari Kebangkitan Nasional, jalan-jalan yang menuju lapangan Monas dan

Istana Negara tertutup bagi umum. Suasana sepi mencekam. Sekitar pukul 05.00 WIB, pada tanggal 20 Mei 1998, Amien Rais mengumumkan melalui siaran langsung yang disiarkan seluruh televisi swasta nasional, bahwa peringatan Kebangkitan Nasional tidak jadi dilaksanakan di Lapangan Monas guna menghindari korban jiwa yang besar pada pihak mahasiswa. Esok hari, sekitar pukul 09.00 WIB, jalan depan Istana Merdeka masih sepi dari kendaraan umum, kecuali kesibukan di Istana Negara sudah tampak semenjak pukul 07.00 WIB. Ternyata Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie pukul 09.00 WIB, 21 Mei 1998.

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 membuktikan betapa manajemen pemerintahan Orba sama sekali rapuh. Krisis keuangan global yang berimbas hingga ke Indonesia membuka borok fundamental ekonomi negara rapuh akibat praktik korupsi.

4. Faktor Ketidakadilan

Potensi disintegrasi yang terjadi pada sebuah negara multikultural seperti Indonesia, lebih disebabkan terjadinya penyumbatan terhadap pertukaran sosial (*social exchange*). Pertukaran sosial merupakan tindakan saling memberi dalam berbagai aspeknya, termasuk redistribusi pendapatan. Dalam proses modernisasi yang didorong pertumbuhan ekonomi melahirkan polarisasi sosial-ekonomi dan sosial-budaya, baik dimensi vertikal maupun horizontal. Polarisasi sebagai kesenjangan sosial-ekonomi dan sosial-budaya menjadi pemicu utama timbulnya konflik terbuka yang dapat berujung pada pertumpahan darah.

Kemajemukan yang ada pada suatu negara jika tidak diiringi dengan adanya keadilan sosial-ekonomi dan sosial-budaya akan sangat mudah memicu konflik. Sentimen anti-Tionghoa sesungguhnya bermula pada persoalan kesenjangan sosial-ekonomi. Orang Tionghoa kebanyakan hidup dalam diskriminasi ras. Orang Tionghoa di Singkawang hidup dalam kemiskinan. Kasus lain, Gerakan Aceh Merdeka baru muncul seiring dengan berdirinya rezim Orde Baru, yang dipicu oleh faktor kebijakan ekonomi yang timpang antara pusat dan daerah. Konflik Madura dan Dayak tidak terlepas pula dengan masalah ekonomi. Konflik agama di Poso

dan Ambon-Maluku bermula juga pada masalah ekonomi.

Lebih dari itu, potensi lain yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik adalah diskriminasi mayoritas pemeluk suatu agama terhadap pendirian bangunan ibadah oleh kelompok pemeluk agama minoritas. Beberapa orang pemeluk agama minoritas pernah mengeluh, "Kami mau mendirikan tempat ibadah harus minta ijin mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kepolisian, hingga Departemen Agama (Depag) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Akhirnya tetap gagal, meski dari Depag, Depdagri, Provinsi, Kabupaten, dan Kepolisian sudah dapat ijin. Akan tetapi di tingkat RT dan RW tetap menolak. Alasannya warga setempat menolak." Kasus sama dalam konteks lain, di Aceh persoalan konflik etnis terjadi antara orang Aceh dan Jawa. Dalam pandangan umum orang Aceh yang tinggal di Provinsi Aceh Darussalam, suku Jawa termasuk penjajah seperti halnya Belanda. Jadi persoalannya bukan pada masalah agama, karena orang Jawa sebagian besar memeluk agama Islam sebagaimana umumnya orang Aceh.

Faktor utama penyumbat kesadaran multikulturalisme terletak pada ketidakadilan ekonomi. Persoalan ketidakadilan ekonomi dapat terjadi secara riil dan atau sekadar masalah persepsi semata yang memunculkan prasangka buruk terhadap kelompok lain. Ketidakadilan ekonomi dapat diselesaikan dengan kebijakan ekonomi yang lebih adil, sedangkan ketidakadilan ekonomi yang timbul atas dasar persepsi jauh lebih sulit diselesaikan.

SIMPULAN

Multikulturalisme agar dapat berkembang lebih baik. Langkah pemecahan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Dalam bidang pendidikan dapat diupayakan dengan memberi muatan materi kurikulum pelajaran multikulturalisme sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam bidang kebudayaan dapat diupayakan salah satunya melalui seni. Dialog melalui seni dapat lebih cair dan egaliter dikarenakan bahasa seni jauh lebih universal ketimbang fungsi bahasa sehari-hari.

Dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan politik terkait langsung dengan soal keadilan. Hanya saja perlu ditegaskan, pencegahan potensi konflik maupun penyelesaian masalah konflik yang sudah terlanjur terjadi, tetap bukan semata-mata menunggu tindakan pemerintah, akan tetapi harus menjadi kesadaran warga negara. Elit masyarakat dan elit politik harus lebih menunjukkan *attitude* yang baik, sehingga menjadi teladan bagi warga negara. Kita perlu membangun masyarakat madani yang kritis terhadap eksekutif, legislatif, parpol, militer, dan birokrat sipil. Multikulturalisme dapat menjadi penguat sistem demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, Benedict R.O. (2002), *Imagined Communities*, (Terjemahan Omi Intan Naomi), Pustaka Pelajar dan Insist, Yogyakarta.
- Brandon, James. (2003). *Jejak-jejak Seni Pertunjukan di Asia Tenggara*, (Terjemahan R.M. Soedarsono), P4ST UPI, Bandung.
- Kaelan, Haji. (2003), *Pendidikan Pancasila*, (Edisi Reformasi), Paradigma, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (1982), *Bunga Rampai Antropologi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- _____. (1990), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, Ahmad Rivai. (5 Januari 2011), Multikulturalisme dan Penerapannya dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, available from: URL: <http://www.lpkub.org/jurnalkub/edisi2/interkultural.htm>
- Slametmuljana. (1968) *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta.
- Soegito, A.T. (1999), "Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sebagai Titik Tolak Memahami Asal-mula Pancasila", dalam makalah pada *Intership Dosen-dosen Pendidikan Pancasila se-Indonesia 1-8 Agustus 1999* di Yogyakarta. Kerjasama Ditjen Dikti Depdikbud, Pusat Studi Pancasila, dan Fakultas Filsafat.
- Yamin, Mr. Hadji Muhammad. (1959), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jajasan Prapantja, Jakarta.